

## DETERMINASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ACEH

Diana<sup>1</sup>, Zulkarnaini<sup>2</sup>, Yeni Irawan<sup>3</sup>, Fakriah<sup>4</sup>, Dwi Meilvinasvita<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

[diana@pnl.ac.id](mailto:diana@pnl.ac.id)<sup>1</sup>, [zulkarnaini@pnl.ac.id](mailto:zulkarnaini@pnl.ac.id)<sup>2</sup>, [irawanyenni1006@gmail.com](mailto:irawanyenni1006@gmail.com)<sup>3</sup>,

[fakriah.1875@gmail.com](mailto:fakriah.1875@gmail.com)<sup>4</sup>, [dwi.nasvita@gmail.com](mailto:dwi.nasvita@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Kapasitas pemerintah daerah terlihat dari capaian kinerja yang dilaksanakan dalam satu periode. Capaian kinerja yang dicapai sangat tergantung dari anggaran yang tercermin dari perencanaan anggaran yang ditetapkan. Program anggaran yang ditetapkan sangat tergantung dari kekuatan pemerintah daerah untuk menentukan bagaimana melaksanakan seluruh program yang dijalankan sehingga berkorelasi langsung dengan kinerja yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mampu untuk memanfaatkan keuangan daerah dengan efisien dalam rangka mencapai kinerja yang baik. Sampel penelitian adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan mulai tahun 2017-2021, dengan model analisis data Regresi Linear Data Panel. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya secara umum pemerintah daerah di Provinsi Aceh masih belum maksimal menunjukkan tingkat independensi, baik untuk kemampuan keuangan maupun kemandirian keuangan dari pemerintah pusat, walaupun pada dasarnya secara total kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap efisiensi keuangan daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah umumnya di Aceh sudah mulai berhati-hati menggunakan anggaran, hanya saja belum tepat sasaran atau dengan kata lain bahwa pemerintah daerah masih lemah dalam memformulasikan potensi kekuatan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus memiliki strategi dan kekuatan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai lambang kekuatan daerah, namun disisi lain pengelolaan belanja daerah juga menjadi sangat menentukan dalam mendorong tercapainya kinerja. Melalui pengelolaan belanja yang efektif dan efisien, diyakini akan memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu pentingnya pengelolaan belanja daerah yang bersumber dari pendapatan daerah sangat penting untuk menjadi rujukan dalam menilai efisiensi keuangan daerah.

**Kata Kunci:** Kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah.

### Abstract

The capacity of local government can be seen from the performance achievements have been carried out in one period. The performance achievements that have been achieved are very dependent on the budget which is reflected in the established budget planning. The budget programs determined is very dependent on the strength of the regional government to determine how to implement all the programs being implemented so that it directly correlates with the performance obtained. This research aims to investigate how local governments are able to utilize regional finances efficiently in order to achieve good performance. The research sample was all local governments in Aceh Province. The data used is the Audit Results Report (LHP) by the Financial Audit Agency (BPK) starting from 2017-2021, with a Linear Data Panel Regression analysis model. The findings of the research results show that in general the regional government in Aceh Province still does not show the maximum level of independence, both in terms of financial capacity and financial independence from the central government, even though basically the total regional financial capacity has an influence on regional financial efficiency. This condition shows that regional governments in general in Aceh have begun to be careful in using their budgets, but they have not been yet on target or in other words, regional governments have been still weak in formulating potential regional strengths. Therefore, regional governments must have strategies and strengths to obtain Regional Original Income (PAD) as a symbol of regional strength, but on the other hand, regional expenditure management is also very determining in encouraging performance achievement. Through effective and efficient spending management, it is believed that maximum results

*will be achieved. Therefore, the importance of managing regional expenditure which originates from regional income is very important as a reference in assessing regional financial efficiency.*

**Keywords:** *Regional financial capacity, regional financial independence, Regional Original Income (PAD), Regional Expenditures, Regional Financial Efficiency.*

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah Aceh yang saat ini menjadi salah satu provinsi yang memiliki hak otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian diganti lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh wajib berfikir untuk mencapai titik maksimal dalam upaya meningkatkan kemampuan seluruh daerah di Aceh serta pelayanan masyarakat. (Janjua et al., 2019) menyatakan bahwa manajemen pemerintah daerah yang efektif sangat penting untuk memberikan pelayanan yang efisien kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Aceh harus mempersiapkan rencana yang sesuai bagi pengembangan daerah dan sesuai dengan kompetensi, karakteristik serta kultur budaya maupun psikologi masyarakat dalam rangka pencapaian kinerja yang baik. Rencana tersebut juga harus dibangun secara strategis, karena (Johnsson et al., 2021) berpendapat bahwasanya meningkatnya strategi pertumbuhan dan layanan yang kompleks bagi pemerintah daerah, membutuhkan adanya adaptasi pengukuran kinerja yang strategis dan terlokalisasi untuk mengintegrasikan kompetensi pembelajaran dan komunikasi dengan kemampuan teknis dan operasional.

Mengacu pada hak otonomi yang telah diberikan, maka pemerintah Aceh wajib bertanggungjawab dan harus memformulasikan kerangka program yang sesuai dengan kemampuan daerah. Pemerintah pusat telah memberikan mandat untuk mampu mengurus rumah tangga masing-masing daerah dengan dasar dan aturan yang kuat dimana setiap daerah ingin dan mampu untuk mengatur daerah dengan pertimbangan keberagaman dan keunikan yang dimiliki. Seperti halnya di Spanyol (García-Juan et al., 2019) menemukan bahwa kinerja pemerintah daerah tergantung dari pemberdayaan struktur organisasi yang dimiliki. Oleh karena itu wajib bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan sumber daya yang kompeten dalam struktur pemerintahan.

Disisi lain permasalahan lain yang kemudian muncul adalah bagaimana pemerintah pusat menilai hasil kinerja yang telah ditumpukan pada seluruh pemerintah daerah. Sampai saat ini persoalan otonomi masih menyisakan masalah yang masih “memberatkan” pemerintah pusat baik menyangkut aspek sosial, politik, budaya maupun agama, sehingga persoalan tersebut harus dihindari agar tidak terjadi penyimpangan terutama pada anggaran yang digunakan. (Haliah, 2021) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa aspek politik, budaya dan regulasi pemerintah telah mengakibatkan timbulnya kesenjangan anggaran. Aspek-aspek tersebut telah menjadi konsumsi bagi pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penilaian kinerja sangat berperan penting dalam mengukur seluruh aspek baik positif maupun negatif sehingga gambaran keberhasilan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja yang merupakan jantungnya pemerintah daerah, harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari keberhasilan daerah. Walaupun menurut (Kuhlmann & Bogumil, 2018) administrasi publik dan pemerintah daerah tidak memiliki standar perbandingan eksternal untuk mengukur dan meningkatkan kerjanya. Ukuran kemandirian daerah yang diukur dari indikator Pendapatan Asli

daerah (PAD), sudah seharusnya memiliki sesuatu nilai lebih baik agar dapat dijelaskan kepada masyarakat. Melalui adanya pengukuran yang tepat, maka pemerintah daerah dapat mengukur tingkat kemandirian dan kemampuan daerah melalui keuangan atau kekuatan yang dimiliki. Perlu diketahui juga bahwasanya pengukuran kinerja tidak hanya mengandalkan anggaran pendapatan saja, namun dapat juga dilihat dari bagaimana pemerintah daerah mampu menghabiskan belanja daerah untuk berbagai program dengan tepat dan efisien. Melalui belanja yang efisien, pemerintah daerah dapat mengukur adanya pengeluaran yang tepat sasaran dan didasari atas perencanaan yang tepat. Oleh karena itu kekuatan belanja harus diperhitungkan sebagai bagian dari keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Titik pangkal dari sebuah tujuan pemerintah daerah adalah kesejahteraan masyarakat, sehingga orientasi pemerintahan lebih ditujukan pada pelayanan publik atau masyarakat yang merupakan point center dari berbagai kebijakan. Arah kebijakan yang lahir dalam bentuk Qanun atau peraturan daerah, harus mencerminkan muatan-muatan teknis dari kalkulasi keuangan serta tata kelola yang baik. Dengan demikian pemerintah daerah saat ini harus lebih peka untuk mencari inovasi dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik, sehingga dapat menawarkan solusi yang argumentatif serta informatif bagi masyarakat.

Kinerja pemerintah daerah harus diukur dengan tepat dan akurat, sehingga akan memperlihatkan posisi pemerintah daerah yang dapat diandalkan. Melalui sistem pengukuran yang dimulai dari atas (visi) sampai ke bawah (implementasi program), maka seluruh unsur kinerja akan dapat dihitung dan dipertanggungjawabkan dengan baik demi kepuasan dan kesejahteraan publik (masyarakat).

Melalui adanya pengukuran kinerja yang digunakan sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah daerah, maka dapat dipastikan bahwa akan ada hasil capaian yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, maka fokus utama yang kemudian harus diperhatikan adalah *outcome* yang memiliki dampak atau domino effect bagi pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Keseluruhan program yang direncanakan oleh pemerintah daerah yang mencakup seluruh aktivitas, pada akhirnya akan mendorong terciptanya kinerja pemerintah yang memuaskan baik secara internal maupun tata kelola pemerintah yang handal. (Farah et al., 2023) setuju bahwa tata kelola pemerintah yang baik merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diturunkan 4 (empat) identifikasi permasalahan yang harus disesuaikan dengan prioritas kepentingan publik, sebagai berikut:

- a. Apakah kemampuan keuangan daerah berpengaruh secara individu terhadap efisiensi keuangan daerah.
- b. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara individu terhadap efisiensi keuangan daerah.
- c. Apakah pengelolaan belanja daerah berpengaruh terhadap efisiensi keuangan daerah.
- d. Apakah kemampuan keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah dan pengelolaan belanja daerah berpengaruh terhadap efisiensi keuangan daerah.

## **Singkronisasi Otonomi Khusus dan Desentralisasi**

Istilah otonomi khusus yang digunakan oleh daerah yang memperoleh hak tersebut, pada dasarnya ditujukan pada keunikan dan kekhususan daerah serta perhatian khusus yang diberikan pemerintah pusat dan dipandang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan suatu daerah. Berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia, Aceh yang memiliki keunikan dari sisi budaya dan kultur agama, serta masih terdapatnya ketertinggalan Aceh yang harus diperhatikan, maka telah menjadikan Aceh sebagai daerah yang dapat dijadikan lahan potensi pengembangan sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Pasal 183 (ayat 1) yang mengamanatkan bahwa sejak tahun 2008 dana otonomi khusus digunakan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Disamping itu lebih lanjut dijelaskan bahwa jumlah 2% akan diterima oleh Aceh sampai tahun kelima belas, sedangkan mulai tahun keenambelas sampai akhir tahun 2027, dana yang diterima akan berkurang menjadi 1%. Jumlah dana yang diterima tersebut dihitung dari total plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara: 2020).

Memasuki tahun 2023 pemerintah Aceh mulai menerima pengurangan dana otonomi khusus yaitu sebesar 1 %. Artinya selama kurun waktu 15 tahun, hasil pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Aceh perlu dievaluasi kembali. Hal ini senada dengan hasil temuan oleh Khairil Akbar dkk. (2021) bahwasanya dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tidak diawasi secara serius, sehingga belum mampu menghasilkan kinerja pemerintah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Lebih jauh hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa sistem pengawasan DOKA belum mampu menjamin pemberantasan korupsi di Aceh.

Sejalan dengan Khairil Akbar, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) tahun 2020, setelah melakukan penelaahan terhadap dana otonomi khusus Aceh, juga menyimpulkan bahwa secara umum masih terdapat banyak permasalahan yang sulit diukur dalam pemanfaatan dan penyaluran DOKA yang telah digunakan sejak tahun 2008-2019. Hal ini disinyalir bahwa masih terdapat kelemahan yang sangat signifikan atas sistem pengawasan DOKA yang seharusnya tidak terjadi dengan matangnya periode pemanfaatan dana yang sudah memasuki tahun keduabelas.

Disisi lain, keistimewaan Aceh yang dibentuk dari aturan *Qanun* daerah, juga memberikan makna tersendiri bagi pemerintah Aceh dalam menjalankan operasional daerah. Arti Qanun yang identik dengan istilah yang diadopsi dari budaya Melayu di Malaka, digunakan semakna dengan adat dan biasanya dipakai ketika ingin membedakan antara hukum yang tertera dalam adat dengan hukum yang tertera dalam kitab fiqih (Liaw Yock Fang 1975:178 dalam Al Yasa' dan M. Daud Yoesoef: 2004). Qanun sebagai peraturan tertinggi daerah yang dibentuk dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, masih belum menghasilkan muatan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan otonomi khusus, sehingga mengakibatkan pelaksanaannya yang belum terarah. Namun disisi lain Qanun yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh, memiliki kedudukan aturan tertinggi setelah Undang-Undang, sehingga pelaksanaannya dapat mengenyampingkan aturan-aturan lain seperti Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri (Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef: 2004).

Selanjutnya pelaksanaan desentralisasi yang menjadi dasar sistem pelaksanaan otonomi khusus, juga menjadi faktor penting dalam melihat keharmonisan keduanya. Pemerintah Aceh melalui sistem desentralisasi asimetris yang diterima dari pemerintah pusat, masih memiliki kendala-kendala yang berhubungan dengan pelaksanaan dalam bidang hukum, politik, pemerintahan dan sosial. Pemerintah pusat dinilai masih belum konsisten untuk melaksanakan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Debora Sanur L.: 2020). Kondisi ini menggambarkan bahwa terjemahan sistem desentralisasi antar pemerintah pusat dan daerah harus ditinjau kembali melalui berbagai upaya yang mampu mendorong pemerintah Aceh khususnya untuk kembali memikirkan konsep yang tepat dan bernilai jual dalam mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera.

Harmonisasi yang dapat dinilai melalui sinkronisasi pelaksanaan otonomi khusus di Aceh dengan sistem desentralisasi yang seharusnya sejalan, namun masih memerlukan tindak lanjut serta evaluasi serius agar tidak merugikan daerah Aceh. Pemerintah Aceh dari satu sisi, perlu melakukan reformasi kedudukan Qanun serta muatan materi yang terkait dan dapat dijadikan indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

### **Pentingnya Pengukuran Kinerja**

Organisasi non profit pada dasarnya merupakan bagian organisasi yang keberadaannya tidak lepas dari tuntutan kinerja akibat penggunaan sumber daya baik secara internal maupun eksternal. Demikian halnya dengan pemerintah daerah, yang merupakan basis dari agen pelaksana operasional pemerintahan, juga menjadi salah satu sasaran lembaga yang harus mengandalkan kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan. Melalui implementasi berbagai indikator kinerja, rasanya tidak berbeda jauh dengan perusahaan atau organisasi profit yang menuntut adanya hasil yang kongkrit dan dapat diterjemahkan ke dalam angka pasti. Pemerintah saat ini baik pusat maupun daerah, sudah harus memikirkan konsep yang lebih akurat untuk menghasilkan kinerja yang dapat diukur dan sesuai dengan tuntutan saat ini.

Untuk lebih mendorong pemerintah daerah menemukan kualitas dalam melaksanakan fungsi sebagai agen perubahan bagi masyarakat, maka pemerintah harus mampu menemukan ukuran kinerja yang tepat dalam mengukur hasil kerja dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan demikian penerapan pengukuran kinerja yang tepat akan sangat membantu dalam memahami hasil yang dicapai. Oleh karena itu, dalam melakukan pengukuran kinerja maka pemerintah daerah harus memahami terlebih dahulu dengan baik menyangkut praktik dan tatacara untuk melaksanakan pengukuran kinerja yang tepat, sehingga akan memperoleh hasil yang memadai. Kinerja pemerintah menyangkut keuangan merupakan hal yang paling utama, disamping sudah pasti adanya sifat *output* sektor publik yang bersifat *intangibile output* (Mardiasmo: 2018). Namun kekuatan utama yang mendorong pemerintah daerah adalah melalui adanya kinerja keuangan yang handal dan tepat sasaran. Dengan demikian pemerintah daerah harus memetakan terlebih dahulu bagaimana proses pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menentukan ukuran yang layak dan metode yang tepat.

Melalui pengukuran kinerja, pihak pemerintah daerah akan mampu memahami dan mendapatkan rekomendasi untuk pengembangan daerah di masa mendatang. Pengukuran kinerja tidak hanya dikenal sebagai alat pengukur kinerja multidimensional yang menggabungkan aspek keuangan dan non keuangan, akan tetapi juga dikenal

sebagai suatu sistem stratejik manajemen yang terintegrasi (Budi Tiara Novitasasri: 2019). Apabila proses penerapan kinerja telah dapat dilaksanakan dengan baik dan terarah, maka arah pengembangan daerah selanjutnya akan mudah ditetapkan dalam berbagai prioritas capaian program yang mampu mengangkat prestasi daerah. Banyak hal yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah saat ini dengan mengacu pada potensi daerah yang dimiliki dan berdampak bagi daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga akan mampu menjamin kesejahteraan bagi masyarakat.

### **Efisiensi Keuangan Daerah**

Efisiensi Keuangan Daerah (EKD) merupakan cerminan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah, artinya semakin kecil belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan, maka akan semakin banyak pendapatan daerah yang dapat diperoleh. Pemerintah daerah dituntut agar mampu merencanakan seluruh potensi daerah yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan sebagai dasar dalam menentukan perolehan sumber-sumber pendapatan daerah tersebut. Berbagai usaha dalam meningkatkan pendapatan daerah harus dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar daerah menjadi mandiri dengan penghasilan yang ada dalam daerah.

Melalui adanya usaha pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja daerah serta memaksimalkan perolehan pendapatan dari belanja tersebut, maka tujuan pemerintah daerah akan berhasil. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Abdul Halim & M.S. Kusufi, 2007). Formulasi Efisiensi Keuangan Daerah (EKD) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$EKD = \frac{\text{Total Belanja Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

### **Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah**

Pada prinsipnya kemandirian dan kemampuan daerah hampir sama, namun apabila dilihat dari maksud dan makna yang dapat diukur secara rasio anggaran, maka kedua hal tersebut menjadi berbeda. Keduanya merupakan titik fokus untuk menghitung bagaimana kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu kedua istilah itu sering digunakan secara bergantian atau bersamaan untuk menekankan arti dari kekuatan atau kelemahan pemerintah daerah. Apabila dilihat dari filosofis makna kata-kata, maka “kemampuan” menggambarkan sesuatu dari dalam sedangkan “kemandirian” adalah dipengaruhi oleh faktor dari luar yang dapat mendorong faktor internal menjadi lebih kuat. Namun keduanya akan memberikan makna akhir terhadap kondisi lemah atau kuatnya pemerintah daerah.

Daerah merupakan wujud dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat atau masyarakat yang wajib bertanggungjawab atas seluruh penggunaan anggaran. Pemerintah yang dikatakan berhasil dan berkinerja baik adalah pemerintah yang siap dan tidak tergantung kepada

pihak manapun, termasuk kepada pemerintah pusat. Fenomena dewasa ini pemerintah daerah sangat tertolong dengan bantuan dari pemerintah pusat. Program-program yang dirumuskan dalam anggaran untuk dijalankan dalam satu periode seharusnya mampu untuk menciptakan kesinambungan yang makin meningkat dari waktu ke waktu. Namun sebagian besar pemerintah daerah belum menyadari permasalahan ini sehingga perlu memahami lebih jauh hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tingkat kemandirian tersebut.

Tingkat kemandirian daerah seharusnya merupakan implementasi dari Undang-undang otonomi daerah yang dapat diukur melalui “hubungan situasional” dengan pemerintah pusat. Terdapat empat hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Abdul Halim (2004:188) sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Dari pola hubungan yang dipaparkan di atas jelas terlihat bahwa terdapat empat situasi yang dapat dihubungkan dengan tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan suatu daerah. Dalam hal ini, sebuah daerah yang sudah mampu melaksanakan otonomi dengan baik, berarti tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat sudah berkurang, malah mungkin tidak ada sama sekali. Kondisi ini jelas menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah yang dapat diukur dari kondisi anggaran ataupun realisasi anggaran yang diperoleh oleh pemerintah daerah setiap periode. Indikator ini salah satunya dapat diukur melalui Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Indikator ini memperlihatkan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu memberikan kekuatan kepada daerah dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan daerah pada tahun tertentu atau keseluruhan pendapatan daerah. Menurut yang dikutip oleh Sukanto Rekso Hadiprojo (2000) dalam Abdul Halim (2004:350) memformulasikan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) ke dalam tiga bentuk yaitu:

$$DDF1 = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

$$DDF2 = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

$$DDF3 = \frac{\text{Sumbangan Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Atau total rekapitulasi perhitungan kemampuan keuangan daerah dapat digabung sebagai berikut:

$$DDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Lebih lanjut untuk memahami kemandirian keuangan daerah secara terpisah, selain kemampuan keuangan daerah yang merupakan total pendapatan daerah seperti telah dijelaskan di atas, maka pemerintah daerah secara lebih rinci harus mampu menjabarkan tingkat kemandirian yang dimiliki melalui perencanaan program dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan baik dan benar sehingga dapat diperoleh tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah harus dijabarkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kemampuan keuangan (yang bersumber dari pihak luar). Kemandirian keuangan daerah merupakan simbol dari kekuatan secara internal pemerintah daerah untuk memformulasikan potensi daerah yang dimiliki dalam rangka untuk meningkatkan total PAD yang menjadi tingkat kekuatan. Formulasi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Derajat Otonomi Fiskal/DOF) adalah sebagai berikut:

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}}$$

### **Pengelolaan Belanja Daerah**

Keberhasilan sebuah daerah sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggunakan belanja daerah sebagai sumber pengeluaran yang sangat penting. Belanja daerah yang digunakan mencerminkan kondisi kebutuhan daerah melalui bentuk aktivitas yang pada akhirnya bermuara pada kekuatan daerah. Apabila pemerintah daerah mampu melakukan formulasi yang tepat terhadap program peningkatan kekuatan daerah, maka belanja yang digunakan sebegini besar akan cenderung bersifat lebih dinamis untuk menunjang pembangunan daerah, selain dari pengeluaran yang bersifat wajib dilakukan.

Demikian halnya dengan pemerintah daerah, yang merupakan basis dari agen pelaksana operasional pemerintahan, juga menjadi salah satu sasaran lembaga yang harus mengandalkan bagaimana belanja digunakan untuk kemudian dikaitkan dengan kinerja yang akan dihasilkan dan diukur. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam membelanjakan dana yang dimiliki, maka salah satu bentuk pengukuran yang dapat dilakukan adalah melalui efisiensi pengelolaan belanja daerah yang bersumber dari total pendapatan daerah. Melalui implementasi berbagai sumber pendapatan daerah, maka selanjutnya dapat diketahui bagaimana pemerintah daerah mampu menghabiskan belanja daerah untuk hal-hal yang bersifat dapat meningkatkan kekuatan daerah. Persamaan Pengelolaan Belanja Daerah (PBD) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PBD = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Untuk lebih mendorong pemerintah daerah menemukan kualitas dalam melaksanakan fungsi sebagai agen perubahan bagi masyarakat, maka pemerintah harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bagaimana pemerintah daerah membelanjakan dana yang bersumber dari penerimaan daerah. Dengan demikian penerapan pengukuran belanja yang tepat akan sangat membantu dalam mengukur kinerja yang tepat dan memahami hasil yang dicapai. Akibat dari terciptanya efisiensi belanja yang digunakan maka akan tercipta prioritas capaian program yang mampu mengangkat prestasi daerah. Banyak hal yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah saat ini dengan mengacu pada potensi daerah yang dapat dibelanjakan oleh pemerintah sebagai wujud dari tanggungjawab penggunaan dana masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain dan Objek Penelitian**

Desain penelitian merupakan seperangkat pilihan pengambilan keputusan yang rasional (Sekaran, 2003). Jenis penelitian ini adalah survei dengan menggunakan *deskriptif verifikatif* yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat serta meneliti hubungan antar variabel dengan uji statistik. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi dan bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002). Sedangkan penelitian *verifikatif* bertujuan untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel (menguji hipotesis) melalui pengumpulan data di lapangan.

Objek dalam penelitian ini adalah kemandirian keuangan daerah atau Derajat Otonomi Fiskal (X1/DOF), kemampuan keuangan daerah atau Derajat Desentralisasi Fiskal (X2/DDF), pengelolaan belanja daerah (X3/PBD) dan efisiensi keuangan daerah (Y/EKD).

### **Sampel Penelitian**

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten maupun Kota yang terdapat dalam wilayah pemerintah Provinsi Aceh, sekitar 24 pemerintah daerah yang menerbitkan laporan keuangan daerah yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mulai dari periode tahun 2017-2021.

### **Sumber Data Penelitian**

Data penelitian merupakan input paling penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Sumber data akan mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan dilakukan dengan baik. Data yang diambil dalam rentang waktu 2017-2021 merupakan data yang sangat dinamis dan mampu menunjukkan perbandingan yang terjadi dalam masa pengamatan seperti peristiwa Covid-19.

### **Metode Analisis Data**

## Regresi Linear Data Panel

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu kemandirian keuangan daerah (DOF), kemampuan keuangan daerah (DDF), dan pengelolaan belanja daerah (PBD) terhadap variabel terikat efisiensi keuangan daerah (EKD) pada pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Aceh periode 2017-2021.

Rumus yang digunakan dalam analisis regresi adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

$Y_{it}$	= Efisiensi Keuangan Daerah (EKD)
$\beta_0$	= Koefisien Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Angka arah koefisien regresi
$X_{1it}$	= Kemandirian Keuangan Daerah (DOF)
$X_{2it}$	= Kemampuan Keuangan Daerah (DDF)
$X_{3it}$	= Pengelolaan Belanja Daerah (PBD)
$e_{it}$	= Standar Error

Analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen juga menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan dependen, mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati,2019).

## Estimasi Model Regresi Panel

Menurut Sulistyio Basuki (2015) dalam metode estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. *Estimasi Common Effect Model (CEM).*

Common Effect Model (CEM) ialah langkah pertama untuk mengestimasi data panel dengan hanya menggabungkan data *time series* dan *cross-section* menggunakan model OLS (Ordinary Least Square). OLS yang dikenal juga dengan pendekatan *pooled Least Square* adalah cara paling sederhana dalam mengestimasi data panel yang mengasumsikan intersep dan slope koefisien dianggap konstan (tetap) baik antar individu maupun antar individu.

2. Estimasi data panel menggunakan *Fixed Effect Model (FEM).*

Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang mengasumsikan bahwa individu tau perusahaan memiliki intersep yang berbeda antar individu tetapi memiliki slope regresi yang sama/tetap dari waktu ke waktu.

3. Estimasi data panel menggunakan model *Random Effect Model (REM).*

Random Effect Model merupakan model yang menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar perusahaan. Model random effect mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep tetapi hal tersebut bersifat random atau stokastik. Terdapat beberapa langkah pengujian data panel untuk memilih estimasi terbaik.

## Pemilihan Model

Menurut Sulistyio Basuki (2015), untuk memilih model yang paling tepat dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, yaitu:

1. *Uji Chow*  
Uji Chow merupakan pengujian untuk emnentukan model Fixed Effect atau Common Effect yang paling tetpat digunakan dalam mengestimasi data panel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari F kritis maka hipotesis nol ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect.
2. *Uji Hausman*  
Uji Hausman adalah penguiian statistik untuk memilih apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect.
3. *Uji Lagrange Mutiplier*  
Uji Lagrange Mutiplier adalah pengujian statistik untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari pada metode commont effect. Apabila nilai LM hitung lebih bedar dari nilai kritis Chi-Square maka artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model Random Effect.

## Uji Asumsi Klasik

Menurut Sulistyio Basuki (2015) mengatakan bahwa uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) meliputi uji Linieritas, Autokolelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normlitas. Meskipun begitu, dalam regresi data panel tidak semua uji perlu dilakukan.

1. Karena model sudah diasumsikan bersifat linier, maka uji linieritas hampir tidak dilakukan pada model regresi linier.
2. Pada syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*), uji normalitas tidak termasuk didalamnya, dan beberapa pendapat juga tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.
3. Pada dasarnya uji autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series (cross section atau panel) akan sia-sia, karena autokorelasi hanya akan teriadi pada data time series.
4. Pada saat model regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas, maka perlu dilakukan uji multikolinieritas, karena jika variabel bebas hanya satu, tidak mungkin terjadi multikolinieritas.
5. Kondisi data mengandung heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section, yang mana data panel lebih dekat dengan ciri-ciri data cross section dibandingkan time series.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada model regresi data panel, uji asumsi klasik yang dipakai hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja.

### - Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji F dan uji t mengasumsikan bahwa nilai residual harus normal. Jika asumsi uji normalitas tidak berdistribusi dengan normal maka uji statistik menjadi

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis grafik pada pengujian normalitas data. Kriteria penelitiannya bisa dilihat pada normal probability plot adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Selain pengujian menggunakan metode grafik bisa digunakan pula metode Kolmogorov-smirnov test (K-S). Kriteria pengambilan keputusannya yaitu jika signifikansi  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal, dan jika signifikansi  $< 0,05$  maka data berdistribusi normal.

- **Uji Multikolinearitas**

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat atau sempurna antar variabel bebas. Uji multikolinearitas ini dilakukan pada variabel bebas yang berjumlah lebih dari dua. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang cukup kuat diantara variabel bebas. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan melihat nilai korelasi antar variabel independen atau biasa disebut dengan korelasi parsial jika nilai korelasi  $< 0,90$  maka dapat dikatakan model regresi tidak ada masalah multikolinearitas.

- **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Identifikasi secara statistik untuk menunjukkan ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat nilai prob-chi<sup>2</sup>. Jika nilai prob-chi<sup>2</sup> signifikan (kurang dari 5%) maka terjadi heteroskedastisitas tetapi jika nilai prob-chi<sup>2</sup> tidak signifikan (lebih dari 5%) maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

## **Pengujian Hipotesis**

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan pada hipotesis penelitian, dimana hipotesis tersebut akan dijabarkan dalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut:

### **Hipotesis pertama**

$H_0 : \beta = 0$  Kemandirian keuangan daerah (DOF), kemampuan keuangan daerah (DDF) dan pengelolaan belanja daerah (PBD) secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi keuangan daerah.

$H_a : \beta \neq 0$  Kemandirian keuangan daerah (DOF), kemampuan keuangan daerah (DDF) dan pengelolaan belanja daerah (PBD) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi keuangan daerah.

### **Hipotesis kedua**

$H_{01} : \beta_1 = 0$  Kemandirian keuangan daerah (DOF) secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi keuangan daerah.

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$  Kemandirian keuangan daerah (DOF) secara individu berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi keuangan daerah.

### **Hipotesis ketiga**

$H_{02} : \beta_2 \leq 0$  Kemampuan keuangan daerah (DDF) secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi keuangan daerah.

$H_{a2} : \beta_2 > 0$  Kemampuan keuangan daerah (DDF) secara individu berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi keuangan daerah.

### **Hipotesis keempat**

$H_{03} : \beta_3 \leq 0$  Pengelolaan belanja daerah (PBD) secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi keuangan daerah.

$H_{a3} : \beta_3 > 0$  Pengelolaan belanja daerah (PBD) secara individu berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi keuangan daerah.

Pengujian hipotesis dan perhitungan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Uji Statistik F**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau secara keseluruhan (uji hipotesis pertama). Untuk menghitung nilai F hitung digunakan rumus : (Gujarati, 2003:258)

$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana:

$R^2$  = Koefisien determinasi  
 $k$  = Jumlah var. independen  
 $n$  = Ukuran sampel

Hasil perhitungan  $F_{hitung}$  yang selanjutnya dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- ❖ Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  :  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak
- ❖ Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  :  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima

## 2) Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{JK_R}{JK_Y}$$

dimana:

$JK_R$  : jumlah kuadrat regresi (*explained sum of square*)

$JK_Y$  : jumlah total kuadrat (*total sum of square*)

Nilai  $R^2$  berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati nilai 1 atau 100%, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## 3) Uji Statistik t

Uji Parsial atau disebut dengan *uji t*, yaitu menguji signifikan konstansta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh terhadap nilai variabel independen (Gujarati, 2003:259). Rumusnya:

$$t = \frac{\beta_i}{S_{\beta_i}}$$

dimana:

$\beta_i$  adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas.  
 $S_{\beta_i}$  adalah standard error dari  $\beta_i$ .

Dari perhitungan tersebut maka selanjutnya membandingkan antara nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$  pada tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ). **enghitung Koefisien Determinasi Parsial**

Determinasi parsial dihitung untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi parsial diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi parsial untuk masing-masing variabel independen. Untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel independen terhadap koefisien determinasi

variabel dependen, digunakan kriteria koefisien korelasi pada Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi**

Frekuensi	Interprestasi
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang / Cukup
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Mengacu pada data yang telah diolah secara statistik, maka hasil penelitian yang dapat disajikan adalah sebagai berikut:

#### a. Tahap Pengujian Model

Pengujian model adalah langkah pertama yang dilakukan untuk menentukan masing-masing model regresi panel dengan mengacu pada 3 (tiga) model yaitu Common Effect (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Proses ini harus dilalui untuk memperlihatkan masing-masing model dengan tujuan agar dapat dipilih nantinya model yang paling baik sebagai model dalam menentukan analisis yang tepat. Setelah dilakukan input data pada Eviews 13, maka diperoleh ketiga model tersebut sebagai berikut:

### Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: EKD  
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/10/23 Time: 11:40  
Sample: 2017 2021  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 24  
Total panel (unbalanced) observations: 118

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.354477	1.091532	-0.324752	0.7460
DOF	13.09989	3.080382	4.252683	0.0000
DDF	-5.915382	2.825556	-2.093528	0.0385
PBD	0.016520	0.079608	0.207522	0.8360
R-squared	0.139610	Mean dependent var		1.692950
Adjusted R-squared	0.116968	S.D. dependent var		8.276835
S.E. of regression	7.777725	Akaike info criterion		6.973715
Sum squared resid	6896.202	Schwarz criterion		7.067637
Log likelihood	-407.4492	Hannan-Quinn criter.		7.011850
F-statistic	6.166002	Durbin-Watson stat		0.996055
Prob(F-statistic)	0.000638			

### Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: EKD  
Method: Panel Least Squares  
Date: 12/10/23 Time: 11:40  
Sample: 2017 2021  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 24  
Total panel (unbalanced) observations: 118

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.848359	1.261250	1.465498	0.1462
DOF	6.042290	3.499320	1.726704	0.0876
DDF	-7.766942	3.437570	-2.259428	0.0262
PBD	0.004812	0.080456	0.059814	0.9524

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.436387	Mean dependent var		1.692950
Adjusted R-squared	0.275355	S.D. dependent var		8.276835
S.E. of regression	7.045746	Akaike info criterion		6.940527
Sum squared resid	4517.471	Schwarz criterion		7.574497
Log likelihood	-382.4911	Hannan-Quinn criter.		7.197938
F-statistic	2.709936	Durbin-Watson stat		1.310749

Prob(F-statistic) 0.000260

---

---

### Random Effect Model (REM)

Dependent Variable: EKD

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/10/23 Time: 11:42

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 24

Total panel (unbalanced) observations: 118

Swamy and Arora estimator of component variances

---

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.266611	1.214497	0.219524	0.8266
DOF	10.82944	3.031997	3.571718	0.0005
DDF	-6.120178	2.842284	-2.153261	0.0334
PBD	0.008973	0.075466	0.118896	0.9056

---

---

#### Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	2.833890	0.1392
Idiosyncratic random	7.045746	0.8608

---

---

## Tahap Pemilihan Model

Tahap pemilihan model merupakan seleksi model terbaik yang dilakukan setelah masing-masing model diperoleh. Untuk menentukan model terbaik tersebut maka dapat dilihat melalui masing-masing 3 pendekatan tes yaitu Chow Test, Hausman Test dan Lagrange Multiplier Test. Hal ini dilakukan untuk menentukan model mana yang paling dominan diantara CEM, FEM dan REM. Berikut akan dilihat masing-masing pendekatan:

### Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.083356	(23,91)	0.0075
Cross-section Chi-square	49.916177	23	0.0009

Melihat hasil Chow Test, maka nilai  $P < 0,05$ , sehingga model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

### Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.034454	3	0.0453

Berdasarkan uji Hausman Test, maka nilai  $P < 0,05$ , sehingga model yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

## Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	4.479369 (0.0343)	0.231258 (0.6306)	4.710627 (0.0300)

Sedangkan untuk uji Lagrange Multiplier nilai  $P < 0,05$ , sehingga model yang dipilih adalah model REM.

Dari ketiga hasil pendekatan uji di atas, maka apabila dilihat nilai probabilitasnya dari masing-masing uji, maka kesimpulannya dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut:

**Tabel 4.1**  
**Pendekatan Uji Model**

Uji Test	CEM	FEM	REM
Chow	-	V	-
Hausman	-	V	-
Lagrange M	-	-	V

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat disimpulkan bahwasanya model yang paling dominan untuk dijadikan sebagai model yang dijadikan analisis menguji hipotesis adalah Fixed Effect Model (FEM).

### b. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM), sesuai dengan hasil pemilihan model yang telah dilakukan sesuai Tabel 4.1 di atas, maka untuk uji analisis hipotesis dapat dilihat pada hasil Tabel 4.2 sebagai berikut:

#### Uji Hipotesis Menggunakan Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: EKD  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 12/10/23 Time: 11:40  
 Sample: 2017 2021  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 24  
 Total panel (unbalanced) observations: 118

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.848359	1.261250	1.465498	0.1462
DOF	6.042290	3.499320	1.726704	0.0876
DDF	-7.766942	3.437570	-2.259428	0.0262
PBD	0.004812	0.080456	0.059814	0.9524

#### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.436387	Mean dependent var	1.692950
Adjusted R-squared	0.275355	S.D. dependent var	8.276835
S.E. of regression	7.045746	Akaike info criterion	6.940527
Sum squared resid	4517.471	Schwarz criterion	7.574497
Log likelihood	-382.4911	Hannan-Quinn criter.	7.197938
F-statistic	2.709936	Durbin-Watson stat	1.310749
Prob(F-statistic)	0.000260		

Persamaan model regresi data panel dapat diturunkan sebagai berikut:

$$EKD = 1.84835857668 + 6.04228970006 * DOF - 7.76694231423 * DDF + 0.00481238070774 * PBD + e$$

Selanjutnya untuk uji masing-masing variabel independen X1, X2, dan X3 terhadap Y baik secara individu dan bersama-sama dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai X1 (DOF) dimana nilai  $P > 0,05$  artinya menolak  $H_a$  dan menerima  $H_0$ , dimana kemampuan keuangan daerah (DOF) tidak berpengaruh terhadap efisiensi keuangan daerah (EKD).
- Nilai X2 (DDF) dimana nilai  $P < 0,05$  artinya menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ , dimana kemandirian keuangan daerah (DDF) berpengaruh signifikan terhadap efisiensi keuangan daerah (EKD).
- Nilai X3 (PBD) dimana nilai  $P > 0,05$ , artinya menolak  $H_a$  dan menerima  $H_0$  dimana pengelolaan belanja daerah (PBD) tidak berpengaruh terhadap efisiensi keuangan daerah (EKD).

- d. Apabila secara bersama-sama, maka nilai Prob (F Statistic)  $< 0,05$  dimana menunjukkan bahwa keseluruhan variabel X1 (DOF), X2 (DDF), X3 (PBD) berpengaruh signifikan terhadap efisiensi keuangan daerah (EKD). Dalam hal ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ .

Sedangkan untuk **uji determinasi** atau nilai hubungan antar variabel independen ( $R^2$ ) maka dapat dilihat nilainya adalah 0,436 atau sekitar 43,6%. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diteliti memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 43,6% dan sekitar 56,4% merupakan faktor lain yang tidak diteliti. Dengan demikian apabila diperhatikan hubungan yang diberikan oleh nilai ( $R^2$ ) berada pada hubungan yang cukup atau sedang.

#### 4.2. Pembahasan

Mengacu pada hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat dilihat secara individu bahwasanya hanya nilai X2 (DDF) yang memberikan pengaruh yang signifikan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemampuan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh telah memberikan informasi bahwasanya secara umum kondisi pemerintah daerah sudah mampu untuk mengelola keuangan dengan efisien, namun sumber penerimaan daerah masih banyak bersumber dari pemerintah pusat. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah belum dapat menunjukkan adanya kekuatan pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah dengan baik dan hanya masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat (masih bersifat konsultatif). Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah daerah umumnya di Aceh sudah mulai berhati-hati menggunakan anggaran, hanya saja belum tepat sasaran atau dengan kata lain bahwa pemerintah daerah masih lemah dalam memformulasikan potensi kekuatan daerah.

Apabila dilihat dari variabel kemandirian keuangan daerah (DOF) dan juga pengelolaan belanja daerah (PBD), ternyata kedua faktor ini masih belum mampu menjelaskan adanya efisiensi keuangan daerah (EKD) dengan baik. Artinya bahwa disatu sisi pemerintah daerah di Provinsi Aceh belum mampu untuk menyediakan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri. Disisi lain ditemukan juga bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengelola belanja daerah dengan baik. Hal ini juga mengindikasikan bahwa program yang direncanakan masih belum terhubung dengan kepentingan atau kebutuhan daerah. Kedua kondisi ini jelas tidak menunjukkan adanya efisiensi yang baik terhadap keuangan daerah.

Dengan demikian dari hasil temuan ketiga variabel yang diteliti, maka dapat dikatakan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Aceh pada umumnya masih harus menyadari bahwa melalui perencanaan program yang efisien, akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan melalui adanya komitmen yang tinggi oleh pemerintah daerah untuk secara perlahan meningkatkan kemampuan daerah melalui penciptaan nilai PAD.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan dari temuan ini bahwa secara umum pemerintah daerah di Provinsi Aceh masih belum maksimal menunjukkan tingkat independensi, baik untuk kemampuan keuangan maupun kemandirian keuangan dari pemerintah pusat, walaupun pada dasarnya secara total kemampuan keuangan daerah berpengaruh terhadap efisiensi keuangan daerah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah umumnya di Aceh sudah mulai berhati-hati menggunakan anggaran, hanya saja belum tepat sasaran atau dengan kata lain bahwa pemerintah daerah masih lemah dalam memformulasikan kekuatan potensi kekuatan daerah. Disamping itu pemerintah daerah di Provinsi Aceh juga harus menyadari bahwa melalui adanya pengelolaan belanja daerah yang baik maka akan menciptakan efisiensi keuangan daerah.

Saran peneliti bahwa pemerintah daerah di Provinsi Aceh agar dapat mendalami kembali potensi yang dimiliki di daerah masing-masing, sehingga program yang direncanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, harus memperhatikan prioritas kebutuhan daerah atau masyarakat.

Keterbatasan penelitian ini adalah masih belum melakukan pemisahan terhadap masing-masing sumber pendapatan daerah, sehingga justifikasi yang dihasilkan masih bersifat umum. Diharapkan rencana ke depan oleh peneliti selanjutnya adalah agar melihat masing-masing rincian kelemahan yang ada di setiap daerah.

## REFERENSI

- Abdul Halim. (2004). **Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah**. Edisi Revisi. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Abdul Halim dan M.S. Kusufi. (2007). **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Al Yasa' Abubakar dan M. Daud Yoesoef. (2004). **Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 1 Nomor 3 Tahun 2004.
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. (2020). **Penelaahan Atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh**. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020.

- Budi Tiara Novitasasri. (2019). **Balanced Scorecard Dalam Institusi Pendidikan Lanjut**. Jurnal Nominal, Volume VIII Nomor 2 Tahun 2019.
- Debora Sanur L. (2020). **Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh**. Jurnal Politica. Volume 11 Nomor 1, Mei 2020.
- Farah, F. A., Mohd Suki, N., Mohd Yusof, M. I., & Yusof, R. (2023). Residents' trust in local government councils in an emerging nation: effect of political efficacy, good governance and performance. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 17(1), 39–53. <https://doi.org/10.1108/TG-02-2022-0015>
- García-Juan, B., Escrig-Tena, A. B., & Roca-Puig, V. (2019). The empowerment–organizational performance link in local governments. *Personnel Review*, 48(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/PR-09-2017-0273>
- Gujarati, Damodar N. (2003). **Basic Econometrics**. 4<sup>th</sup> Edition, New York, McGraw Hill. New York.
- Haliah, H. (2021). A study of performance model development and good governance budgeting. *International Journal of Law and Management*, 63(3), 301–319. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0122>
- Janjua, A., Attique, F., Raza, A., & Akbar, W. (2019). Effective performance management of local governments in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 68(1), 26–45. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-11-2017-0300>
- Johnsson, M. C., Pepper, M., Price, O. M., & Richardson, L. P. (2021). “Measuring up”: a systematic literature review of performance measurement in Australia and New Zealand local government. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 18(2), 195–227. <https://doi.org/10.1108/QRAM-11-2020-0184>
- Kuhlmann, S., & Bogumil, J. (2018). Performance measurement and benchmarking as “reflexive institutions” for local governments: Germany, Sweden and England compared. *International Journal of Public Sector Management*, 31(4), 543–562. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2017-0004>
- Kharil Akbar, Zahlul Pasha Karim, Nyak Fadlullah, Muhammad Siddiq Armia (2021). **Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi**. INTEGRITAS: Jurnal Anti Korupsi. Nomor 7 Volume 1, Halaman 101-120. e-ISSN/p-ISSN: 2615-7977/2477-118X DOI: 10.32697/integritas.v7i1.719.
- Mardiasmo. (2018). **Akuntansi Sektor Publik**. Penerbit: Andi. Yogyakarta.

Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi**. BPFE-UGM. Yogyakarta.

Sekaran, Uma. (2003). **Research Methods for Business, A Skill building Approach**. Fourth Edition. Wiley. Pp. 87.